



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Daftar Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana Lampiran I menjadi acuan bagi setiap PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi;
- KETIGA : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) sebagaimana Lampiran II menjadi acuan pada PPID Satuan Polisi Pamong Praja PP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA' around the top and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA' around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Arifin

NIP 197206221992031003

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0014 Tahun 2024
Tanggal : 11 September 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A. Informasi Profil Badan Publik							
1	Kedudukan, Domisili, Beserta Alamat Lengkap Dan Kontak	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	Selamanya	satpolpp.jakarta.go.id
2	Visi Dan Misi	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
3	Tugas Dan Fungsi	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
4	Struktur Organisasi	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
5	Profil Pimpinan	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	5 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
6	Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara (LHKPN)	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id

B. Ringkasan Informasi Mengenai Program / Kegiatan Yang Sedang Di Jalankan							
	1	Nama Program Kegiatan, Penanggung jawab, pelaksana program, jadwal kegiatan, target capaian, dan anggaran	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	2	Agenda pelaksanaan tugas	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	3	Rencana Kerja	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
C. Ringkasan Laporan Keuangan							
	1	Laporan Keuangan	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	2	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	3	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	5	Informasi Realisasi Anggaran	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
D. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik							
	1	Informasi rekapitulasi permintaan informasi publik	Satpol PP	PPID	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	2	Informasi rekapitulasi keberatan informasi publik	Satpol PP	PPID	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id
	3	Dokumen laporan pelayanan informasi publik	Satpol PP	PPID	berkala setiap tahun	Online	1 tahun satpolpp.jakarta.go.id

E.	Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan yang ditetapkan	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
F.	Informasi Mengenai Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Serta Tata Cara Pengajuan Keberatan	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
G.	Informasi mengenai Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
H.	Informasi Mengenai Pengumuman Pengadaan Barang Dan Jasa						
	1 Rencana Umum Pengadaan Barang Dan Jasa	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
	2 Daftar pengadaan Barang dan jasa melalui LPSE	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
J.	Kalender Kegiatan	Satpol PP	Sekretariat	berkala setiap tahun	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id

II. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A.	Daftar Informasi Publik	Satpol PP	PPID	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
B.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan						
1	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
2	Daftar Rancangan Peraturan Keputusan, dan/atau Kebijakan	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
C.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan						
1	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
2	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Administrasi	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
3	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Kepegawaian	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
D.	Surat-Surat Perjanjian dengan pihak ketiga	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
E.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
F.	Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id

G. Aset	Dokumen Perbendaharaan atau Inventaris	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
H. Informasi tentang Rencana Strategis							
	1 Dokumen Rencana Strategis	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
	2 Dokumen Rencana Kerja	Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
I. Publik	Informasi tentang Pedoman Pelayanan	Satpol PP	PPID	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
J. Informasi mengenai Hasil Penelitian		Satpol PP	Sekretariat	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
K. Infografis		Satpol PP	PPID	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
L. Video Informasi		Satpol PP	PPID	Setiap saat	Setiap saat	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id

III. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A.	Informasi berkaitan dengan kebijakan kedaruratan	Satpol PP	Sekretariat	Serta merta	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
B.	Informasi mengenai tata cara penanganan kedaruratan	Satpol PP	Sekretariat	Serta merta	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id
C.	Upaya pencegahan kedaruratan	Satpol PP	Sekretariat	Serta merta	Online	1 tahun	satpolpp.jakarta.go.id


 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI DKI JAKARTA,

 Arifin
 NIP 197206221992031003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0014 Tahun 2024
Tanggal : 11 September 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

No	Ringkasan isi informasi	Dasar/alasan Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan		Masa retensi
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pelanggar Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama Pelanggar - Alamat - NIK	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi)	1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada Pelanggar 2. Menghambat proses Penegakan Perda 3. Berpotensi melanggar Hak dari Pelanggar Perda	1. Melindungi privasi individu pelanggar Perda 2. Memperlancar proses penegakan Perda	10 Tahun
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan, meliputi : - Hari, Tanggal dan Waktu - Lokasi operasi - Target operasi	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana) ▪ Pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum)	1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP 3. Membahayakan petugas operasi	1. Keberhasilan Upaya penindakan lebih besar 2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
3	Strategi Pengamanan Pejabat Negara dan Objek Vital, meliputi : - Hari, Tanggal dan Waktu - Lokasi Pengamanan - Kegiatan - Pejabat yang hadir	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf c angka 1 (Informasi tentang strategis, intelijen, operasi, taktik dan Teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dalam dan luar negeri) ▪ Pasal 17 huruf i (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiahkan kecuali atas Putusan Komisi Informasi	1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara 2. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian Pengamanan tertutup 3. Mengganggu keamanan Objek Vital	1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara 2. Menjamin Keamanan Objek Vital	5 Tahun

4	Data Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama - NIP - Alamat - NIK - Pendidikan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi petugas 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan petugas	Data Pribadi petugas terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)
5	Data Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, meliputi : - Nama - NIP - Alamat - NIK - Pendidikan	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya) ▪ Pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga) ▪ Pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi petugas 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan petugas	Data Pribadi petugas terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)
6	Data Pelaku Kriminalitas yang tertangani, meliputi : - Nama - Alamat - NIK	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik ▪ Pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	1. Berpotensi mengungkap data pribadi 2. Beresiko terhadap keamanan dan keselamatan korban dan pelapor 3. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Data Pribadi korban dan pelapor terlindungi	30 Tahun (PP No 61 Tahun 2010)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DKI JAKARTA,



Arifin

NIP 197206221992031003